DEMOKRASI DI TENGAH TANTANGAN KEMAJEMUKAN BANGSA INDONESIA

Dyah Hanna Rahmawati¹, Happri Novriza Setya Dhewantoro²

^{1,2}Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri Yogyakarta, Jl. Colombo Yogyakarta No. 1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

e-mail: dyahhanna.2022@student.uny.ac.id¹ e-mail: happrisetya@uny.ac.id²

Abstrak

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemajemukan budaya, etnis, dan agama yang sangat tinggi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai laboratorium sosial dalam penerapan demokrasi di masyarakat multikultural. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kondisi demokrasi dijalankan dalam konteks keberagaman yang kompleks, serta menelaah tantangan dan strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat demokrasi yang inklusif di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif, yang mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber ilmiah seperti buku, jurnal, dan artikel akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi dan multikulturalisme merupakan dua konsep yang saling terkait erat dalam membentuk tatanan sosial dan politik yang adil. Namun, pada pelaksanaannya demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, seperti politik identitas, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta konflik sosial berbasis perbedaan budaya atau agama. Untuk itu diperlukan langkah konkret berupa pendidikan multikultural yang menanamkan nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman, kebijakan afirmatif yang menjamin representasi yang adil, serta penguatan dalam dialog antar agama dan budaya. Selain itu, media dan teknologi informasi juga berperan dalam strategis dalam membentuk opini publik dan memperkuat nilai-nilai demokrasi multikultural. Penelitian ini menegaskan bahwa demokrasi yang berhasil di Indonesia tidak sekedar demokrasi prosedural, melainkan demokrasi yang substansial serta mampu mengakomodasi pluraritas masyarakat dan membangun kehidupan berbangsa yang inklusif, damai, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Demokrasi, Multikultural, Pendidikan, Politik Identitas, Kebijakan Afirmatif, Teknologi Informasi

Abstract

Indonesia is a country with a very high level of cultural, ethnic, and religious diversity. This makes Indonesia a social laboratory in the implementation of democracy in a multicultural society. This study aims to examine how democracy is implemented in the context of complex diversity, and to examine the challenges and strategies that can be applied to strengthen inclusive democracy in Indonesia. The method used is a literature study with a qualitative approach, which collects and analyzes scientific sources such as books, journals, and academic articles. The results of the study show that democracy and multiculturalism are two concepts that are closely related to each other in forming a just social and political order. However, in its implementation, democracy in Indonesia still faces serious challenges, such as identity politics, discrimination against minority groups, and social conflicts based on cultural or religious differences. For this reason, concrete steps are needed in the form of multicultural education that instills values of tolerance and respect for diversity, affirmative policies that guarantee fair representation, and strengthening dialogue between religions and cultures. In addition, the media and information technology also play a role in the strategy of forming public opinion and strengthening the values of multicultural democracy. This research confirms that successful democracy in Indonesia is not merely procedural democracy, but rather substantial democracy that is able to accommodate the plurality of society and build an inclusive, peaceful, and just national life.

Keywords: Democracy, Multicultural, Education, Identity Politics, Affirmative Action Policy, Information Technology

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara paling beragam di dunia, ditandai dengan kekayaan budaya, keragaman etnis, pluralisme agama, serta ratusan bahasa daerah yang tersebar dari sabang hingga merauke. Jauh sebelum berdirinya negara Republik Indonesia, masyarakat Nusantara telah

dikenal memiliki warisan kebudayaan yang sangat beragam. Keragaman ini bukanlah fenomena baru, melainkan bagian yang tak terpisahkan dari identitas historis bangsa yang terbentuk melalui proses panjang interaksi antarsuku, perdagangan lintas wilayah, pertukaran budaya, hingga penyebaran agama-agama dunia. Dari sabang hingga merauke, masing-masing kelompok masyarakat mengembangkan bahasa, adat istiadat, sistem nilai, kesenian, hingga cara hidup yang khas dan berbeda satu sama lain. Realitas sosial yang dihuni oleh beragam suku bangsa, bahasa lokal dan agama ini secara sosiologis disebut sebagai masyarakat multikultural (Prasisko et al., 2019). Dalam konteks Indonesia, multikulturalisme bukan sekedar konsep teoritis, melainkan kenyataan kehidupan sehari-hari yang mengisi ruang sosial, politik, dan budaya bangsa. Masyarakat multikultural Indonesia mencerminkan momok sosial yang dinamis, dimana perbedaan menjadi elemen penting dalam pembentukan identitas kolektif sekaligus menjadi tantangan dalam mewujudkan integrasi nasional.

Konsekuensi sosial yang kompleks ini menjadikan Indonesia sebagai laboratorium hidup bagi penerapan sistem demokrasi dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks ini, demokrasi tidak semata-mata dimaknai sebagai struktur politik atau prosedur elektoral, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mengelola perbedaan memperkuat kohesi sosial, dan mencegah potensi konflik berbasis identitas. Penerapan demokrasi dalam kondisi kemajemukan tentu tidaklah mudah. Oleh karena itu, penghargaan terhadap keragaman budaya harus disertai dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip inklusi, penghargaan terhadap perbedaan, dan upaya aktif untuk membangun kohesi sosial yang adil, bukan hanya secara simbolik. Pengelolaan masyarakat multikultural ini menjadi bagian penting dari membangun tatanan politik yang stabil dan responsif terhadap kebutuhan semua warga negara tanpa diskriminasi dalam kerangka negara demokratis. Pemerataan representasi, perlindungan hak kelompok minoritas, serta penguatan partisipasi politik warga negara dari berbagai latar belakang menjadi isu krusial yang harus dihadapi secara serius. Oleh penting untuk memahami bagaimana demokrasi di Indonesia tidak hanya beroperasi dalam ranah formal kelembagaan, tetapi juga bekerja dalam relasi sosial yang penuh dinamika antar kelompok budaya dan agama.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian ini melibatkan pengumpulan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber yang relevan seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah mengenai pendidikan demokrasi dan multikultural. Melalui pendekatan ini, diharapkan peneliti dapat memberikan gambaran upaya dalam menjaga demokrasi di tengah tantangan multikultural di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Demokrasi dan Multikulturalisme

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang kaya akan keragaman budaya, demokrasi dan multikultural adalah dua konsep yang saling terkait. Multikulturalisme menjunjung tinggi pengakuan terhadap keragaman budaya dan etnis di suatu negara, sedangkan demokrasi memberikan landasan bagi partisipasi rakyat dalam proses pemerintahan. Dalam situasi ini, memahami dan menerapkan multikulturalisme berdampak langsung pada demokrasi. Multikulturalisme kerap dimaknai bukan sekedar sebagai bentuk apresiasi terhadap keragaman budaya, melainkan juga sebagai pendekatan strategis untuk merespons dan mengelola potensi konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan identitas dalam masyarakat (Lumowa, 2022). Konsep ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap eksistensi berbagai kelompok budaya, sekaligus mendorong terciptanya harmoni sosial melalui penghormatan, dialog, dan kerjasama. Salah satu pendekatan yang dianggap efektif dalam membangun masyarakat yang lebih damai dan menghargai keberagaman budaya adalah melalui pendidikan multikultural. Strategi ini dianggap penting karena dapat menumbuhkan sikap toleransi, pemahaman, serta apresiasi perbedaan ditengah kehidupan sosial yang majemuk (Irwan et al., 2022). Dalam konteks ini, pendidikan memainkan peran penting sebagai media untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi secara nyata, terutama dalam menjamin prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap hak setiap individu, tanpa memandang perbedaan latar belakang budaya yang dimiliki. Selain itu, pendidikan yang

menekankan pada prinsip-prinsip multikultural memiliki peran yang krusial dalam menyusun identitas nasional yang inklusif dan mendukung penguatan demokrasi.

Pendidikan demokrasi memegang peranan krusial sebagai sarana untuk mensosialisasikan nilai-nilai dasar demokrasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Melalui proses pendidikan ini, warga tidak hanya di perkenalkan pada prinsip-prinsip formal demokrasi seperti pemilu, sistem perwakilan dan kebebasan berpendapat, tetapi juga diajak untuk memahami secara lebih mendalam makna substantif dari demokrasi itu sendiri, antara lain keterlibatan aktif, penghormatan terhadap hak asasi manusia, toleransi terhadap perbedaan, serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, pendidikan demokrasi bertujuan menanamkan nilai-nilai demokratis dalam pola pikir, sikap dan perilaku warga negara agar mampu menjadi bagian dari masyarakat sipil yang kritis, sadar hak dan kewajiban, serta berkontribusi secara positif dalam proses pengambilan keputusan publik (Widiyanto & Istiqomah, 2023). Implementasi pendidikan demokrasi tidak terbatas pada institusi formal seperti sekolah ataupun perguruan tinggi, tetapi juga mencakup pendidikan nonformal dan informal melalui kegiatan komunitas, media, organisasi masyarakat sipil, serta diskusi publik.

Demokrasi dan multikulturalisme saling berkaitan secara signifikan dalam dinamika sosial dan budaya, khususnya di Indonesia yang dikenal sebagai bangsa dengan kekayaan etnis dan budaya yang tinggi. Upaya melakukan pendidikan serta kebijakan publik yang menanamkan nilai-nilai multikultural bukan hanya berperan dalam menjaga keharmonisan antar kelompok masyarakat, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam memperkuat serta memperluas praktik demokrasi yang menjunjung inklusivitas dan keadilan sosial.

3.2 Tantangan Demokrasi dalam Masyarakat Multikultural

3.2.1 Politik Identitas dan Diskriminasi

Identitas seringkali digunakan oleh oknum politik untuk meraih dukungan dengan mengedepankan isu-isu etnis, agama atau kelompok tertentu. Politik identitas dipahami sebagai mekanisme yang mengartikulasikan kepentingan kelompok berdasarkan suku, ras, agama, atau etnis. Ini juga digunakan untuk menanggapi rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok tertentu. Hal ini dapat memicu polarisasi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, misalnya dalam isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang digunakan untuk mendiskreditkan lawan politik. Menurut (Rusjdi Ali Muhammad, 2015), politik identitas awalnya dimaksudkan untuk menggabungkan aspirasi nasional, tetapi sering digunakan dalam pemilu untuk mendapatkan dukungan melalui penyuluhan identitas kelompok. Jika identitas yang muncul tidak selaras dengan nilai-nilai kebangsaan yang inklusif, ini dapat menyebabkan diskriminasi dan radikalisme. Hal ini dinyatakan oleh (Raja Faidz el Shidqi, 2022) bahwa politik identitas tidak hanya menimbulkan polarisasi tetapi juga dapat memicu terorisme, radikalisme, dan diskriminasi rasial jika individu tertentu menggunakan masalah ini untuk keuntungan mereka sendiri. Dengan mengeksploitasi masalah identitas, orang mengaburkan tujuan politik yang ideal, yaitu politik identitas seharusnya membantu memperjuangkan keadilan sosial tanpa menyebabkan stigma atau ketidaksetujuan antar kelompok.

Contoh lain dalam keagamaan adalah kelompok garis keras agama menyerang sebuah kegiatan ibadah umat lain dan tak sungkan untuk menyerang kelompok yang dianggap berbeda dengan yang di yakini (Ayunda et al., 2022). Kurangnya pemahaman yang menyeluruh menjadi salah satu pemicu munculnya sikap fanatisme terhadap hal-hal tertentu, serta mendorong terbentuknya pandangan eksklusif yang berlebihan. Hal ini kemudian membatasi cara pandang seseorang, sehingga hubungan yang dibangun cenderung bersifat satu arah dan hanya berfokus pada relasi vertikal antara manusia dengan Tuhan, tanpa mempertimbangkan aspek hubungan sosial antarsesama manusia.

Politik identitas menjadi salah satu pemicu disintegrasi bangsa, terutama saat diterapkan dalam konteks politik dalam negeri di daerah-daerah yang multikultural. Penggunaan isu-isu identitas sering kali melahirkan stigma negatif dan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyerang kelompok lain, baik mayoritas terhadap minoritas maupun sebaliknya (Raja Faidz el Shidqi, 2022). Sebagai contoh politik identitas juga terjadi saat 2014 silam, saat pemilihan presiden yang mempertemukan pasangan Joko Widodo & Jusuf Kalla dengan Prabowo & Hatta Rajasa. Muncul polarisasi tajam ditengah masyarakat yang diperparah dengan isu-isu provokatif dari masing-masing kubu pendukung. Situasi ini memanaskan saat Basuki Tjahja Purnama (Ahok) terjerat kasus penistaan agama yang memicu

konflik horizontal akibat pernyataannya terkait ayat suci Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan politik identitas dianggap kurang tepat, terutama dalam konteks politik lokal maupun nasional. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman suku, budaya, ras, dan agama, penggunaan politik identitas justru berpotensi memperbesar perpecahan diantara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang.

3.2.2 Konflik Sosial dan Kekerasan

Ketegangan antar kelompok dan etnis dapat bujurng pada konflik sosial dan kekerasan. Menurut Soerjono Soekanto (Jatmiko, 2021), konflik dapat dipicu oleh beberapa faktor utama, diantaranya adalah perbedaan individu, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan. Perbedaan antar individu terjadi karena setiap orang memiliki pandangan, pendirian, dan keyakinan yang beragam. Ketidaksamaan ini sering kali menjadi pemicu munculnya pertentangan antar pihak. Sementara itu, perbedaan budaya berkaitan dengan latar belakang pola-pola kebudayaan yang tidak sama, yang kemudian membentuk perbedaan dalam cara berpikir dan bersikap, sehingga turut memperbesar potensi konflik diantara individu maupun kelompok.

Menurut (Rusjdi Ali Muhammad, 2015), konflik berpotensi berkembang menjadi tindakan kekerasan ketika tidak tersedia ruang dialog yang memadai untuk menyampaikan perbedaan. Ketika pendapat dan keluhan masyarakat diabaikan, serta kondisi ketidakadilan dan ketidakstabilan terus berlanjut, maka ketegangan sosial pun semakin mudah meledak. Proses penyelesaian konflik sering dihambat oleh trauma yang dialami korban konflik sebelumnya. Luka batin, baik yang bersifat pribadi maupun kenangan kolektif tentang kehilangan, penderitaan, atau kekerasan, dapat memiliki dampak yang signifikan. Trauma tidak hanya membatasi kemampuan individu atau kelompok untuk berpikir kreatif dan menghasilkan ide-ide baru, tetapi juga dapat memicu kekerasan baru sebagai cara pelampiasan terhadap pihak yang dianggap sebagai lawan. Sebagai contoh pada masa orde baru, demi menjaga stabilitas politik, isu-isu SARA dianggap sebagai ancaman disintegrasi dan dipandang sebagai kekuatan pemersatu. Rezim saat itu merespons dengan pendekatan penyeragaman budaya dan politik di bawah sistem otoriter. Sayangnya, kebijakan ini tidak menyelesaikan persoalan kemajemukan, justru memperuncing persoalan.

3.3 Upaya Memperkuat Demokrasi dalam Masyarakat Multikultural

Memperkuat demokrasi dalam masyarakat yang penuh keragaman seperti Indonesia berarti meningkatkan partisipasi politik dan memastikan bahwa semua orang dari berbagai agama, budaya, dan etnis dapat hidup berdampingan secara adil dan setara. Untuk membangun demokrasi yang inklusif dan berkeadilan, diperlukan tindakan strategis yang mencakup kebijakan afirmatif, pendidikan multikultural, dan dialog lintas agama dan budaya. Keberagaman yang dipadukan dengan semangat multikulturalisme dapat menciptakan mozaik budaya dan peradaban yang unik dan bernilai. Namun, dibutuhkan langkah konkret untuk menjaga semangat kebhinekaan tersebut agar tidak tergerus oleh sikap yang menolak perbedaan, yang pada akhirnya dapat memicu perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (Nugroho, 2017). Berikut, upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat demokrasi dalam masyarakat multikultural adalah sebagai berikut:

3.3.1 Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi di tengah masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk generasi muda yang mampu menjadi agen perubahan dalam membangun masyarakat inklusif dengan menanamkan nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan kesetaraan. Menurut (Widiatmaka & Yusuf Hidayat, 2022), menyatakan bahwa Pendidikan multikultural sangat penting bagi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak muda, melalui sistem pendidikan formal. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat menerima dan memahami bahwa kemajemukan adalah suatu keniscayaan. Dengan demikian, semua orang akan dapat saling menjaga, menghormati, dan menghargai perbedaan. Strategi pendidikan yang bertujuan untuk menegakkan dan menghargai pluralisme, demokrasi, dan humanisme diharapkan akan menghasilkan generasi yang selalu menjunjung tinggi moralitas, kedisiplinan, kepedulian humanistik, dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari (Yaqin, 2021). Hal ini juga didukung oleh pendapat (Nainggolan & Nababan, 2024), bahwa Pendidikan multikultural membantu mengatasi diskriminasi dan meningkatkan toleransi di lingkungan akademik. Siswa dari berbagai latar belakang diajak bekerja

sama dalam proyek melalui metode "Promosi Kerjasama Antarbudaya", yang menekankan prinsip kerja sama dan toleransi antarbudaya, yang menciptakan lingkungan yang inklusif dan memperkuat hubungan antar individu. Dengan demikian, pendidikan multikultural membantu siswa memahami keberagaman dan mengajarkan mereka cara berkomunikasi dengan orang dari berbagai budaya dan mengatasi perbedaan secara konstruktif. Pendidikan multikultural ini menjadikan siswa sebagai agen perubahan yang membantu membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.

3.3.2 Kebijakan Afirmatif

Kebijakan afirmatif merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah untuk memastikan representasi yang adil bagi kelompok minoritas dalam berbagai bidang, seperti politik, pendidikan, dan pekerjaan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Ode et al., 2024) *Affirmative Action* atau juga dikenal juga sebagai tindakan afirmatif, adalah suatu kebijakan yang dirancang untuk mengurangi diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Tujuan utamanya adalah mengurangi ketimpangan dan mendorong partisipasi aktif dari semua kelompok dalam proses demokrasi.

Sebagai contoh pada daerah Baubau, DPRD Kota Baubau telah menerapkan kebijakan yang menetapkan kuota 30% perwakilan perempuan di parlemen sebagai bentuk deklarasi politik. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif, yang selama ini kurang. Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi banyak hambatan, seperti budaya patriarki dan keterbatasan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Hal ini menunjukkan bahwa upaya lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan afirmatif bekerja. Di bidang pendidikan, kebijakan afirmatif juga diterapkan untuk meningkatkan akses kelompok minoritas, seperti masyarakat Papua, ke pendidikan tinggi. Tujuan program afirmasi ini adalah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di masa depan dengan memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama (Rivai, 2017). Oleh karena itu, kebijakan afirmatif memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pelaksanaannya dengan baik dan dukungan dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah yang timbul.

3.3.3 Dialog Antar Agama dan Budaya

Dialog antara agama dan budaya memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia yang multikultural. Melalui dialog ini, kelompok-kelompok yang berbeda dapat saling memahami dan berbagi kepercayaan, yang merupakan dasar untuk menyelesaikan perbedaan secara damai dan mencegah konflik. Dialog antar agama adalah pendekatan humanistik yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan daripada hanya diskusi teologis. Dalam hal ini (Sihombing, 2021) menekankan bahwa untuk mewujudkan perdamaian dan persahabatan antarumat beragama, dialog antaragama di Indonesia harus didasarkan pada aspek manusia, bukan keyakinan agama semata. Hal ini dituangkan kedalam sebuah karya dari Banawiratama yang berjudul "*Seven Moment of Interreligious Dialogue*" dan karya Stokke yang berjudul "*Dimensions of Citizenship*", yang mana penelitian ini menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran dialog antar agama dalam mengatasi berbagai tantangan historis serta mendorong terciptanya praktik kewarganegaraan yang lebih inklusif (Kusmayani, 2023). Selain itu, didukung oleh pendapat (Noor & Siregar, 2015) bahwa dialog antar agama dan budaya juga dipengaruhi oleh pendidikan multikultural yang membantu orang memahami dan menghargai keberagaman. Dengan memasukkan dialog antaragama ke dalam kurikulum pendidikan, siswa dapat belajar untuk menghargai dan menerima perbedaan, yang memungkinkan mereka untuk membuat lingkungan yang inklusif dan adil. Sebagai contoh dalam dialog antar agama bisa kita lihat dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal di Jakarta. Hal itu merupakan bentuk upaya dialog antara agama yang mana beliau menekankan betapa pentingnya persaudaraan dan kerja sama lintas agama untuk mengatasi masalah global seperti konflik dan degradasi lingkungan. Kunjungan ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap keharmonisan antar umat beragama. Oleh karena itu, diskusi atau berdialog antar agama dan budaya adalah sarana penting untuk menyelesaikan perbedaan dan juga merupakan dasar untuk membangun masyarakat demokratis yang inklusif dan damai.

3.4 Peran Media dan Teknologi dalam Demokrasi Multikultural

Media dan teknologi informasi memiliki peran yang sangat signifikan dalam memperkuat demokrasi multikultural di Indonesia. Teknologi dan media sangat penting untuk mempromosikan pertukaran budaya, meningkatkan partisipasi politik yang inklusif, dan menanamkan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Komunikasi antara mayoritas dan minoritas dapat difasilitasi oleh media tradisional dan digital, yang mendukung integrasi nasional dan mengurangi potensi konflik yang disebabkan oleh perbedaan etnis, agama, dan budaya (Yoteni et al., 2023). Teknologi dan media tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga memerangi stereotip dan meningkatkan partisipasi kelompok yang kurang terwakili, termasuk perempuan dalam politik. Keterlibatan ini adalah salah satu pilar demokrasi multikultural yang kuat. Metode serupa juga dapat diterapkan untuk menyebarkan informasi multikultural melalui media digital, di mana teknologi informasi memainkan peran yang signifikan dalam menciptakan ruang komunikasi yang lebih luas dan interaktif (Yulianto, 2024).

Dengan bantuan teknologi digital, pendidikan multikultural sangat penting untuk menanamkan prinsip demokrasi sejak dini. Hal ini di jelaskan dalam penelitian (Danurahman et al., 2021) yang menunjukkan bahwa kemajuan teknologi informasi telah mendorong pengembangan pendekatan pembelajaran yang menggabungkan prinsip-prinsip multikultural. Strategi-strategi ini membantu memperkuat identitas nasional dan memberikan generasi muda kesadaran dan toleransi terhadap perbedaan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Nugraha, 2020) bahwa pendidikan multikultural sangat penting untuk meminimalkan konflik sosial dan menjaga keutuhan negara. Di era teknologi modern, penggunaan platform informasi dan media sosial tidak hanya menyebarkan informasi tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Dalam demokrasi, penggunaan teknologi digital memungkinkan berbagai aspirasi kelompok masyarakat digabungkan melalui saluran komunikasi yang interaktif dan mudah diakses. Oleh karena itu, demokrasi yang responsif, inklusif, dan mampu mengimbangi berbagai budaya dibantu oleh media dan teknologi (Yulianto, 2024). Melalui kajian diatas, hal ini menunjukkan bahwa kerja sama teknologi dan media sangat penting untuk memperkuat demokrasi multikultural Indonesia. Teknologi memberikan infrastruktur yang mendukung transparansi, akses informasi yang luas, dan partisipasi politik yang lebih merata, sedangkan media berfungsi sebagai alat untuk mengedukasi, menginformasikan, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kedua elemen ini sangat penting untuk membangun demokrasi yang adil dan berdaya saing di era globalisasi.

4. KESIMPULAN

Indonesia negara multikultural keragaman budaya, etnis, agama, dan bahasanya yang sangat beragam. Keanekaragaman ini telah menjadi bagian integral dari identitas nasional, bukan hanya fakta historis atau geografis. Multikulturalisme dan demokrasi saling mendukung, bukan hanya konsep terpisah, demokrasi bukan hanya sistem elektoral dan institusi, melainkan juga alat sosial untuk mengatasi keragaman dan memperkuat kohesi. Penerapan demokrasi dalam masyarakat multikultural menghadapi tantangan besar, khususnya dalam bentuk politik identitas, diskriminasi dan konflik sosial yang dapat memecah belah masyarakat. Politik identitas sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, sementara ketegangan antar kelompok dan etnis bisa berujung pada kekerasan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret untuk memperkuat fondasi yang inklusif dan adil bagi semua lapisan masyarakat.

Tindakan strategis meningkatkan pendidikan multikultural yang mengajarkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan sejak dini, membuat kebijakan afirmatif untuk memastikan bahwa kelompok minoritas menerima representasi yang adil, mengembangkan dialog antaragama dan budaya untuk membantu saling memahami dan menghindari konflik. Media dan teknologi informasi juga sangat penting untuk menciptakan ruang untuk diskusi, menyebarkan nilai-nilai inklusif, dan memperkuat pluralitas nasional. Pada akhirnya, demokrasi yang berhasil di Indonesia bukanlah demokrasi yang sekedar prosedural, melainkan demokrasi substansial yang mampu mewartakan keberagaman dan menjadikannya sebagai kekuatan untuk membangun bangsa. Multikulturalisme bukanlah tantangan yang harus di hindari, tetapi potensi yang harus dikelola dengan bijak demi

menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Atas nama tim penulis, kami menyampaikan terimakasih yang tulus kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Politik, Demokrasi dan Multikultural atas bimbingan, dukungan, dan arahan yang sangat berharga dalam proses penyusunan dan pelaksanaan penelitian ini. Kami juga mengapresiasi kerjasama dengan anggota tim penulis yang telah berkontribusi secara maksimal, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayunda, A. Z., Urbaningkrum, S. M., Nusaibah, A. W., Septiana, W., Widyani, S. S. N., & H, A. R. (2022). Tantangan Multikulturalisme di Indonesia: Menyoal Relasi Agama dan Ruang Publik. *Alsysis*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.58578/alsysis.v2i1.138>
- Danurahman, J., Prasetyo, D., & Hermawan, H. (2021). Kajian Pendidikan Multikultural Di Era Digital. *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 8. <https://doi.org/10.31002/kalacakra.v2i1.3515>
- Irwan, I., Kamarudin, K., & Mansur, M. (2022). Membangun Kebhinekaan Antar Remaja dalam Perspektif Pendidikan Multikulturalisme. *Jurnal Basicedu*, 6(2), 2301–2311. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i2.2173>
- Jatmiko, D. (2021). Kenakalan remaja klithih yang mengarah pada konflik sosial dan kekerasan di Yogyakarta. *Humanika*, 21(2), 129–150. <https://doi.org/10.21831/hum.v2i2.37480>
- Kusmayani, A. E. P. (2023). Youth Interfaith Dialogue in Everyday Citizenship in Indonesia: Bridging Religious Diversity and Citizenship Challenges. *Focus*, 4(2), 159–168. <https://doi.org/10.26593/focus.v4i2.7375>
- Lumowa, V. (2022). Diskursus Multikulturalisme dan Wajah Indonesiannya. *Jurnal Filsafat*, 32(2), 311. <https://doi.org/10.22146/jf.66815>
- Nainggolan, G. R., & Nababan, P. N. (2024). Peran Pendidikan Multikultural dalam Mempromosikan Toleransi dan Mengatasi Diskriminasi di Sekolah. *Jurnal Pendidikan ...*, 1(2). <https://ejournal.marqchainstitute.or.id/index.php/Merdeka/article/view/121%0Ahttps://ejournal.marqchainstitute.or.id/index.php/Merdeka/article/download/121/137>
- Noor, N. M., & Siregar, F. M. (2015). Religious and Multicultural Education: Introducing Interfaith Dialogue in the Indonesian Educational System. *Al-Albab*, 2(1), 67–76. <https://doi.org/10.24260/alalbab.v2i1.23>
- Nugraha, D. (2020). Urgensi Pendidikan Multikultural Di Ndongesia. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1(2), 140-149.
- Nugroho, H. (2017). Multikulturalisme dan Politik Anti Kekerasan. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.22146/jps.v2i2.30000>
- Ode, L., Muskur, M., Tambunan, S. O., Hukum, F., Ikhsanuddin, U. D., & Indonesia, B. (2024). ANALISIS YURIDIS AFFIRMATIVE ACTION KUOTA 30 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA BAUBAU. 5(2), 102–109.
- Prasisko, Y. G., Mercu, U., Yogyakarta, B., Institut, B., & Multikultural, M. (2019). *Demokrasi Indoensia dalam Masyarakat Multikultural*. 1–12.
- Raja Faidz el Shidqi, L. A. (2022). *POLITIK IDENTITAS: RADIKALISME, TERORISME DAN DISKRIMINASI RASI*. 3(1). <https://doi.org/10.24853/independen.x.x.xx-xx>
- Rivai, A. B. (2017). Kebijakan Afirmasi Pendidikan Tinggi Untuk Papua. *CosmoGov*, 1(2), 266. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11838>
- Rusjdi Ali Muhammad, D. S. (2015). Konflik dan Kekerasan. *Kompasiana.Com*, 10(3), 755–759. <https://www.kompasiana.com/niswatin.khoiroh/54f74804a33311e108b476a/konflik-dan-kekerasan>
- Sihombing, A. F. (2021). Menuju Dialog Antar Agama-Agama di Indonesia. *TE DEUM (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)*, 3(1), 63–80. <https://doi.org/10.51828/td.v3i1.83>

- Widiatmaka, P., & Yusuf Hidayat, M. (2022). *JIPSINDO (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia) Pendidikan multikultural dan pembangunan karakter toleransi oleh*. 09(02), 119–133.
- Widiyanto, D., & Istiqomah, A. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi. *Jurnal Pendidikan*, 32. No.1(1), 1–10.
<http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jp/article/view/2826>
- Yaqin, A. (2021). *Pendidikan Multi Kultural*. Lkis Pelangi Aksara.
- Yoteni, A. A., Nurlatifah, N. D., & Pramana, R. (2023). Peran Media Massa dalam Mendorong Partisipasi Politik Perempuan untuk Memperkuat Demokrasi di Indonesia. *Action Research Literate*, 7(9), 72–78. <https://doi.org/10.46799/ar.v7i9.158>
- Yulianto, I. (2024). *Peran Teknologi Informasi Dalam Demokratisasi the Role of Information Technology in Democratization*. 3(1), 128–135.